

ISSN (Print) : 1412-7601  
ISSN (Online) : 2654-8712  
Volume 5, No.2 September 2019  
<http://www.ekonobis.unram.ac.id>

**EKONOBIS**

## **Analisis Pengaruh Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Kecamatan Terare Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016-2017**

**Hadi Mahmudi, Muaidy Yasin, Lukman Hakim.**

Universitas Mataram

### ARTICLE INFO

*Keywords :*  
*Poverty, Village Fund, Allocation of Village Fund, Multiple Panel Data Regression*

**ABSTRACT :** *This research is a descriptive quantitative research on village fund policy and poverty alleviation in Terare District East Lombok Regency year 2016-2017 in supporting the implementation of regional autonomy. The variables used in this analysis is the village fund (DD) and allocation of village fund (ADD) data in Terare District, East Lombok regency of 2016-2017. The analytical tool used in this research is multiple panel data regression. The results of panel data regression analysis chose the best model is the Common Effect Model, with DD variables not significantly influence the poverty rate and ADD variables significantly influence the poverty rate in Terare District. Adjusted R<sup>2</sup> value of 0.52 or 52% of the village poverty variable in Terare Subdistrict is able to be explained by the village fund and allocation of village fund. Village fund and allocation of village fund has a negative coefficient, which means those each additional village fund and allocation of village fund will reduce poverty.*

*Kata Kunci :*  
*Kemiskinan, dana desa, alokasi dana desa, regresi data panel*

**ABSTRAK:** *Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif tentang kebijakan dana desa dan pengentasan kemiskinan di Kecamatan Terare Kabupaten Lombok Timur tahun 2016-2017 dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Variabel yang digunakan dalam analisis ini adalah data Dana Desa (DD) dan data Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Terare Kabupaten Lombok Timur tahun 2016-2017. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini Regresi berganda data panel. Hasil analisis regresi data panel memilih model terbaik ialah Common Effect Model, dengan variabel DD berpengaruh tidak signifikan terhadap angka kemiskinan sedangkan variabel ADD berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Kecamatan Terare. nilai R<sup>2</sup> Adjusted sebesar 0,519 atau 52% dari variabel kemiskinan desa di Kecamatan Terare mampu dijelaskan oleh variabel dana desa dan alokasi dana desa. Dana Desa dan Alokasi dana desa memiliki koefisien negatif, yang mana memiliki arti setiap penambahan dana desa dan alokasi dana desa akan menurunkan angka kemiskinan.*

Corresponding Author :

Alamat : Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Jln. Majapahit No. 62 Mataram.

e-mail: [Hadimahmudi@unram.ac.id](mailto:Hadimahmudi@unram.ac.id)

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan bagi desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana Desa (DD) dimaksudkan sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program Pemerintah Desa. Data menunjukkan untuk mendorong pembangunan yang dimulai dari tingkat desa, di tahun 2017 dana desa dipastikan naik, dari Rp 670 miliar tahun 2016 naik menjadi Rp 865 miliar pada tahun 2017 (Petikan APBN 2017 di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin, 19 Desember 2016). Total dana desa yang diterima Propinsi NTB tahun 2017 sebesar Rp 865.014.066.000. Dana sebesar itu secara berurutan besarannya ditranfer ke Kabupaten Lombok Timur Rp 209,3 miliar, Bima sebesar Rp 155,2 miliar, Sumbawa Rp 129,3 miliar, Lombok Tengah Rp 118,5 miliar, Lombok Barat Rp 108,7 miliar, Dompu Rp 61,1 miliar, Sumbawa Barat Rp 47,7 miliar dan Lombok Utara Rp 34,8 miliar.

Tujuan penggunaan Dana Desa di dalamnya adalah untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014). Selain itu, sumber pendapatan desa yang lain adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Salah satu tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pengentasan kemiskinan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007). Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah Dana Desa, masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan (Abidin, 2015).

Masalah kemiskinan merupakan salah satu perosalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya. Terkadang ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya

suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin misalnya krisis ekonomi, juga gaya hidup dan budaya yang justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan (Astuti, 2012).

Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan mempertimbangkan pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Pasalnya, banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan, namun dikategorikan miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan, diantaranya tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah perdesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat perdesaan (Bank Dunia, 2000). Seperti halnya kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur.

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama seluruh Kabupaten Kota di NTB termasuk Kabupaten Lombok Timur. Upaya Pemerintah Daerah mengurangi angka kemiskinan melalui intervensi

program belum membuahkan hasil yang positif. Rata rata seluruh Kabupaten Kota di NTB hanya mampu menurunkan angka kemiskinan tidak lebih dari satu persen tiap tahun atau separuh dari target Pemerintah Provinsi yaitu 2 persen. Di Lombok Timur, dalam kurun waktu 4 tahun pemerintah daerah baru bisa menekan angka kemiskinan sampai 18 koma 26 persen pada tahun 2017. Angka ini diharapkan bisa menurun sampai tahun 2018 menjadi 17 persen sesuai target rpjd 2013 2018.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah penduduk berdasarkan data profil daerah tahun 2016 mencapai 1 173 781 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 adalah 473.836 jiwa (Badan Pusat Statistik Lombok Timur, 2016). Jumlah Kecamatan di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 16, diantaranya adalah Kecamatan Terara sebagai pusat bendungan Pandan Duri. Jumlah penduduk Kecamatan Terare pada tahun 2015 sebanyak 68.178 jiwa atau 5,81% dari jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Dana Desa maupun ADD memiliki potensi besar untuk

mengentaskan kemiskinan, sehingga perlu untuk segera dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kecamatan Terare Kabupaten Lombok Timur.”

### **Rumusan Masalah**

1. Mengidentifikasi faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan yang berada di Kecamatan Sekarbeka Kota Mataram.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

### **Tujuan Penelitian**

1. Mengidentifikasi faktor – faktor apa yang menyebabkan terjadinya perubahan pemanfaatan lahan yang berada di Kecamatan Sekarbeka Kota Mataram.
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi terhadap perekonomian masyarakat di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kemiskinan**

Miskin didefinisikan sebagai ketidakmampuan berpartisipasi dalam

bermasyarakat secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu bentuk kemiskinan tidak hanya unidimensi tetapi mencakup juga kemiskinan insani dan kemiskinan martabat (Lubis, 2004). Kemiskinan adalah profil kehidupan masyarakat yang menggambarkan ketidakmampuannya untuk hidup layak dan berpartisipasi dalam pembangunan yang sedang dan terus berjalan. Kemiskinan tersebut akan menghambat perkembangan dirinya, mempersulit masyarakat secara luas, dengan sendirinya menghambat pembangunan (Pasandaran, 1994).

Pendekatan kemiskinan yang dilakukan oleh BPS dalam menghitung garis kemiskinan berdasarkan pada ukuran pendapatan, dimana batas kemiskinan dihitung dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Mengenai kebutuhan makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari, dan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa.

Sedangkan Sayogyo (1985), dalam menentukan garis kemiskinan menggunakan ekuivalen konsumsi beras per kapita. Tolok ukur yang digunakan

untuk mengukur batas garis kemiskinan tersebut adalah pendapatan yang bernilai setara dengan 240 kg beras untuk penduduk di desa dan 360 kg beras di kota. Tingkat kemiskinan penduduk ditinjau dari segi pendapatan ini diukur dari pengeluaran kebutuhan dasarnya. Indikator yang digunakan untuk menyatakan kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar adalah Head Count Index (HCI), yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan (Lubis, 2004). Sementara itu, Arsyad (1992), menyatakan ada 2 macam ukuran kemiskinan yang umumnya digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. (1) Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan pendapatan dan kebutuhan, perkiraan kebutuhan yang dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk dapat hidup secara layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimumnya, maka dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. (2) Kemiskinan relatif, dimana

tingkat kemiskinan lebih ditujukan pada perbandingan tingkat kehidupan satu wilayah dengan wilayah lain.

Kemiskinan merupakan masalah utama pembangunan yang sifatnya kompleks dan multi dimensional. Persoalan kemiskinan bukan hanya berdimensi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, politik, bahkan juga ideologi. Secara umum kondisi kemiskinan ditandai oleh kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhannya. Oleh karena sifat kemiskinan yang multi dimensi tersebut maka kemiskinan telah menyebabkan akibat yang beragam dalam kehidupan nyata, antara lain: (a) secara sosial ekonomi menjadi beban masyarakat, (b) rendahnya kualitas dan produktivitas masyarakat, (c) rendahnya partisipasi masyarakat, (d) menurunnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, (e) menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan (f) kemungkinan merosotnya mutu generasi yang akan datang. Semua indikator tersebut merupakan kondisi yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain (Depkimpraswil, 2002).

Chalid (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan yang terjadi di Indonesia secara konseptual terbagi dalam tiga kategori yakni, pertama, kemiskinan alamiah, kemiskinan yang timbul sebagai akibat sumberdaya yang langka jumlahnya, atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah, termasuk di dalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumberdaya alam yang tetap. Kedua, kemiskinan struktural, kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sehingga mereka tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Ketiga, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi/adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta-pesta adat lainnya termasuk juga dalam hal ini sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang orientasi ke depan.

Frank (1984) menyatakan keterbelakangan merupakan hasil dari hubungan yang diadakan oleh negara-negara berkembang dengan negara maju. Pernyataan tersebut menjelaskan suatu keadaan bahwa kemiskinan selain

disebabkan adanya faktor internal seperti mentalitas dan kemiskinan juga disebabkan struktur dan pola hubungan negara. Sedangkan Tawney (dalam Chalid 2006: 6.6) menuturkan sebuah ilustrasi tentang Cina tahun 1931 bahwa, ada daerah-daerah dimana posisi penduduk pedesaan ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher sehingga ombak yang kecil sekalipun sudah cukup untuk menenggelamkannya.

### **Penanggulangan Kemiskinan**

Penanggulangan kemiskinan di berbagai negara berkembang sekarang ini secara umum telah mengakui adanya paradigma baru (ul Haq, 1995). Bukti empiris di negara berkembang telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin jauh lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi tidak dengan sendirinya mengalir ke seluruh lapisan rakyat jika semua orang tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam memiliki akses ke sumber daya kunci.

Tingkat hidup golongan masyarakat miskin tidak dapat dinaikan hanya dengan menaikkan daya belinya melalui program kesejahteraan sosial yang biasanya berumur pendek. Peningkatan tingkat hidup golongan miskin hanya bias

dilaksanakan dengan peningkatan produktivitasnya. Hal ini menuntut adanya kelembagaan baru yang dapat menjangkau kelompok-kelompok masyarakat ini, karena struktur kekuasaan yang ada sering kali berpijak pada hubungan sekutu yang berbeda-beda antara elit politik dan ekonomi

Pasar bukanlah alat yang berhasil-guna dan dapat diandalkan untuk menentukan penggunaan sumber daya bila pembagian pendapatan sangat pincang. Sistem harga yang berlaku sering kali hanya merupakan suatu alat dari perimbangan kekuasaan ekonomi dan politik yang ada. Dalam lingkungan seperti ini mekanisme pasar tidak akan berfungsi efektif dan merata kecuali jika struktur hak milik alat produksi diubah secara mendasar. Perumusan strategi pembangunan yang berpijak pada kebutuhan pokok manusia dan bukan permintaan pasar harus lebih banyak mendapat perhatian.

Penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik dari bentuk lama yang disusundi pemerintahan pusat, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin juga disertai dukungan pemerintah pusat atau swasta di daerah (Kementrian

Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi daerah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jarak spasial maupun temporal yang lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas kegiatan tersebut berada di tangan pemerintah di aras kabupaten dan kota, serta pemerintah desa. Berbagai kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dikeluarkan dan diimplementasikan bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan pada akhirnya juga menjadi aspek pembangunan yang tidak dapat dipisahkan karena pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak secara otomatis mengurangi angka kemiskinan tetapi malah yang terjadi adalah tingkat kesenjangan yang semakin tinggi. Strategi mengembangkan dan meningkatkan peranan usaha masyarakat dalam mencapai kemandirian serta kemampuan dan otonomi daerah adalah wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi ekonomi. Mubyarto (1996) mengemukakan bahwa perekonomian rakyat harus benar-benar menjadi bagian penting dari system ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Pengalaman penanggulangan kemiskinan pada masa lalu telah memperlihatkan berbagai kelemahan, antara lain berupa : (1) masih berorientasi kepada pertumbuhan makro tanpa memperhatikan aspek pemerataan, (2) kebijakanyang bersifat sentralistik, (3) lebih bersifat karikatif daripada transformatif, (4) memposisikan masyarakat sebagai obyek daripada subyek, (5) orientasi penanggulangan kemiskinan yang cenderung karikatif dan sesaat dari pada produktivitas yang berkelanjutan, serta (6) cara pandang dan solusi yang bersifat generik terhadap permasalahan kemiskinan yang ada tanpa memperhatikan kemajemukan yang ada. Karena begitu beragam sifat tantanganyang ada, maka penanganan persoalan kemiskinan harus menyentuh dasar sumber dan akar persoalan yang sesungguhnya, baik langsung maupun tak langsung (Bappenas, 2008).

Kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan menurut Sumodiningrat (1996) digolongkan dalam 3 kelompok, yaitu (1) kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi penduduk miskin, (2) kebijaksanaan yang secara langsung mengarah pada

peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran, dan (3) kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin dan daerah terpencil melalui upaya yang sangat khusus.

Kebijaksanaan tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya peningkatan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan serta penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Kebijakan langsung diarahkan pada peningkatan akses terhadap prasarana dan sarana yang mendukung penyediaan kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan. Sedangkan kebijaksanaan khusus diutamakan pada penyiapan penduduk miskin di lokasi yang terpencil untuk dapat melakukan kegiatan sosial ekonomi sesuai dengan budaya pada masyarakat setempat. Konsep tersebut di atas dapat dipahami bahwa kemiskinan penduduk selalu berkaitan dengan pendapatan penduduk yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, pemukiman, kesehatan dan pendidikan.



## **Penelitian Terdahulu**

Menurut Gunatilaka (2001), Ahmad dan Tanzi (2002) dikutip dalam Prasetyanto (2012), desentralisasi mempunyai hubungan yang erat dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu sistem desentralisasi sangat diperlukan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan. Bahkan dengan sistem desentralisasi seharusnya dapat memberi ruang kepada penduduk miskin dengan peningkatan partisipasi yang lebih besar dalam proses politik dan pembangunan.

Sukesi (2007), meneliti efektifitas ADD di Kabupaten Pacitan mengungkapkan bahwa Program bantuan ADD juga memberi dampak positif terhadap peningkatan pelayanan masyarakat oleh pemerintah desa. Sementara Hong (2010) menganalisis kebijakan fiskal di Korea Selatan setelah krisis, menggunakan data tahun 1961-2008. Penulis menemukan bahwa stimulus fiskal Korea pada tahun 2008, memiliki kontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi dengan cepat, dan luar biasa besar dibandingkan dengan respon fiskal selama kemerosotan ekonomi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran yang cukup penting baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun dalam mengurangi kemiskinan secara

nasional. Demikian pula, penelitian yang dilakukan Suwandi (2013), dengan menggunakan path analysis menemukan adanya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pengurangan angka kemiskinan di Papua.

Nanga (2006) dalam studinya menunjukkan bahwa era desentralisasi fiskal mempunyai indikasi yang sangat kuat untuk memperburuk tingkat kemiskinan di perdesaan. Sementara itu Usman (2006) dalam studinya menemukan bukti bahwa era desentralisasi fiskal memang meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian namun dampaknya dari segi perbaikan distribusi pendapatan baru sebatas indikasi karena belum terbukti secara nyata. Selanjutnya pengeluaran Pemerintah di sektor pertanian berhasil menurunkan kemiskinan lebih baik dibandingkan sektor lainnya, dikarenakan sektor pertanian memiliki keterkaitan (linkages) yang besar terhadap sektor lainnya.

Sementara itu, Mahfud (2009) menyatakan sebagian besar penggunaan ADD lebih banyak diarahkan pada kegiatan fisik (pembangunan sarana dan prasarana fisik) dan penambahan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk dana purna bakti, tunjangan dan

sejenisnya serta sebagian lagi untuk kegiatan rutin. Sementara itu, dari aspek realisasi masih ditemui realisasi ADD di bawah 60%.

Kajian mengenai kemiskinan perdesaan dilakukan oleh Hernowo (2010), dalam kesimpulannya menyatakan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di desa, dipengaruhi oleh jenis tipologi desa yang terkait dengan sumber matapencarian tertentu. Penelitian ini juga mengisyaratkan harus ada penciptaan dan pengembangan lembaga ekonomi yang sudah ada, lembaga ekonomi ini seperti keberadaan koperasi, unit pelaksana teknis (UPT), tempat pelelangan ikan (TPI), dimana akan lebih banyak membantu masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan pendapatannya. Sehingga Alokasi Dana Desa dapat membantu mengurangi kemiskinan.

Kemudian, penelitian Hargono (2011) di Kabupaten Karang Asem Bali menemukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diberikan ke setiap desa tidak menggunakan formula yang ditentukan dengan pembobotan tujuh variabel penting desa, tetapi menggunakan pembagian total jumlah desa di Kabupaten untuk penentuan ADDM (ADD Merata) dan pembagian total jumlah banjar dinas untuk penentuan ADDP (ADD

proporsional). Dengan demikian, cara tersebut dinilai tidak adil bagi Desa, sehingga menimbulkan ketidakefektifan penyaluran ADD.

Penelitian tentang Dampak Alokasi Dana Desa terhadap Perekonomian telah dilakukan oleh Prasetyanto (2012), hasil kajiannya menunjukkan ADD mampu meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian daerah, mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan produk domestik regional bruto sektor pertanian. Dilihat dari aspek yuridis dan ADD terhadap pembangunan desa, seperti yang dikemukakan oleh Aldi (2012), hasil penelitiannya menyimpulkan Pelaksanaan alokasi dana desa di desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum efektif, beberapa kendala yang ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, belum berlakunya pembagian alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah, dan masih adanya "lobi-lobi" yang dilakukan pemerintah desa kepada pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan relatif rendahnya sumber daya manusia di desa.

Senada dengan penelitian sebelumnya, Thomas (2013) meneliti Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa

Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Hasil kajiannya menunjukkan 30% dari dana ADD bias tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sisanya kurang optimal. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD disinyalir menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Terare, yang terdiri dari 16 desa Kabupaten Lombok Timur. dengan kriteria tertentu kepada Desa yang terdapat penduduk miskin, pernah menerima Dana Desa, dan desa tersebut memiliki laporan pertanggungjawaban. Jenis penelitian adalah kuantitatif yang bersifat explanatory yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Kuncoro, 2013). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kecamatan Terare Kabupaten Lombok Timur, yang terdiri dari 16 desa.

### **Variabel Penelitian**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yaitu kemiskinan desa yang diukur dengan

jumlah penduduk miskin, variabel independen adalah Dana Desa (X1) dan Alokasi Dana Desa (X2). Sedangkan jenis data adalah data sekunder, yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016-2017 sebagai sumber data. Teknik pengumpulan data dengan melakukan dokumentasi.

### **Metode Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi dengan data panel dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Dimana Y adalah Kemiskinan Desa,  $\beta_0$  adalah Konstanta/Intercept,  $\beta_1, \beta_2$  adalah Koefisien Regresi Parsial, X1 adalah Dana Desa dan X2 adalah Alokasi Dana Desa.

Langkah-langkah Analisis data penelitian diatas sebagai berikut :

### **Regresi Data Panel**

Regresi data panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Jika kita memiliki T periode

waktu ( $t = 1, 2, \dots, T$ ) dan  $N$  jumlah individu ( $i = 1, 2, \dots, N$ ), maka dengan data panel kita akan memiliki total unit observasi sebanyak  $NT$ . Jika jumlah unit waktu sama untuk setiap individu, maka data disebut *balanced panel*. Jika sebaliknya, yakni jumlah unit waktu berbeda untuk setiap individu, maka disebut *unbalanced panel*. Sedangkan jenis data yang lain, yaitu: data *time-series* dan data *cross-section*. Pada data *time series*, satu atau lebih variabel akan diamati pada satu unit observasi dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan data *cross-section* merupakan amatan dari beberapa unit observasi dalam satu titik waktu.

Analisis data dilakukan dengan metode *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*, uji kriteria model menggunakan uji *LM Breush-Pagan*, uji *Chow*, dan uji *Hausman*. Uji statistik antara lain Uji  $t$ , Uji  $F$ , dan  $R^2$  (koefisien determinasi) untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan (serentak) maupun secara parsial (masing-masing variabel).

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

a. *Common Effect Model* atau *Pooled Least Square (PLS)*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data desa sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel.

b. *Fixed Effect Model (FE)*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar desa, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar desa. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

c. *Random Effect Model (RE)*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep

diakomodasi oleh error terms masing-masing desa. Keuntungan menggunakan model Random Effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS).

### Penentuan Metode Estimasi Regresi Data Panel

#### a. Uji Chow

Chow test adalah pengujian untuk menentukan model apakah Common Effect (CE) ataukah Fixed Effect (FE) yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

#### b. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan.

#### c. Uji Lagrange Multiplier

Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik daripada metode Common Effect (PLS) digunakan.

### Uji Beda Dua Mean Rata - Rata

Untuk menganalisa data ada tidaknya perbedaan kemiskinan di Kecamatan Terare antara tahun 2016 dan 2017 menggunakan uji beda dua mean rata-

rata dengan persamaan sebagai berikut: (Sugiyono, 2002)

$$t = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}{s_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}}$$

$$s_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$$

Keterangan:

X1= rata-rata angka kemiskinan di Kec.

Terare tahun 2016

X2= rata-rata angka kemiskinan di Kec.

Terare tahun 2017

n1 = banyaknya desa tahun 2016

n2 = banyaknya desa tahun 2017

s1 = standar deviasi angka kemiskinan di Kec. Terare tahun 2016

s2 = standar deviasi angka kemiskinan di Kec. Terare tahun 2017

Uji hipotesis tingkat signifikansi  $\alpha=0,05$  dengan kriteria:

Ho : b1 = b2 : angka kemiskinan tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sama

H1 : b1 > b2 : angka kemiskinan tahun 2016 dan tahun 2017 adalah tidak sama

Hasil perhitungan t hitung dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikansi 5%. Jika Ho diterima jika t hitung > t tabel dan Ho ditolak jika t hitung > t tabel.

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### Kemiskinan di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2017

.

**Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin di Kecamatan Terara Tahun 2016 - 2017**

No	Nama Desa	$\Sigma$ Penduduk Miskin	
		2016	2017
1	Terara	275	275
2	Kalianyar	215	215
3	Sukadana	280	280
4	Suradadi	275	275
5	Selagik	225	225
6	Jenggik	270	270
7	Rarang	270	270
8	Rarang Tengah	275	275
9	Rarang Batas	220	220
10	Rarang Selatan	260	260
11	Embung Raja	250	250
12	Embung Kandong	220	220
13	Santong	275	275
14	Leming	225	225
15	Lando	285	285
16	Pandan Duri	230	230
<b>Jumlah</b>		<b>4.050</b>	<b>4.050</b>

**Sumber: Kecamatan Terara dalam Angka, 2017**

1. Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kecamatan Terara pada tahun 2016 – 2017 tetap. Jumlah penduduk miskin di Kecamatan Terara sebanyak 4.050 Jiwa yang tersebar pada 16 desa. Desa dengan penduduk miskin terbanyak ialah Desa Lando dengan jumlah 285 jiwa. Desa Lando merupakan salah satu desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Terara yaitu sebesar 6.280, sehingga dapat dikatakan bahwa 4,53%

penduduk di Desa Lando merupakan penduduk miskin. Sedangkan desa dengan jumlah penduduk miskin terendah ialah Desa Kalianyar dengan jumlah 215 jiwa atau sebesar 9,42% penduduk di Desa Kalianyar tergolong penduduk miskin.

Dana Desa di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2017

Tujuan pemerintah memberikan dana desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui

peningkatan pelayanan publik di desa, desa sebagai subjek dari pembangunan memajukan perekonomian desa, sehingga dapat mengentaskan mengatasi kesenjangan pembangunan kemiskinan. antar desa serta memperkuat masyarakat

**Tabel 2 Dana Desa Kecamatan Terara Tahun 2016 – 2017**

No	Nama Desa	Dana Desa (Rp)		Jumlah (Rp)	%
		2016	2017		
1	Terara	678.749.000	864.036.000	1.542.785.000	27%
2	Kalianyar	644.451.000	820.494.000	1.464.945.000	27%
3	Sukadana	727.867.000	926.392.000	1.654.259.000	27%
4	Suradadi	704.193.000	823.711.000	1.527.904.000	17%
5	Selagik	651.612.000	829.585.000	1.481.197.000	27%
6	Jenggik	683.516.000	870.088.000	1.553.604.000	27%
7	Rarang	300.230.486	844.283.000	1.144.513.486	181%
8	Rarang Tengah	683.256.000	869.757.000	1.553.013.000	27%
9	Rarang Batas	642.501.000	818.019.000	1.460.520.000	27%
10	Rarang Selatan	642.383.000	817.868.000	1.460.521.000	27%
11	Embung Raja	655.499.000	834.520.000	1.490.019.000	27%
12	Embung Kandong	637.356.000	811.486.000	1.448.842.000	27%
13	Santong	680.658.000	866.460.000	1.727.118.000	27%
14	Leming	653.124.000	831.505.000	1.484.629.000	27%
15	Lando	706.891.000	899.763.000	1.606.654.000	27%
16	Pandan Duri	661.672.000	842.356.000	1.504.028.000	27%
<b>JUMLAH</b>		<b>10.353.958.486</b>	<b>13.570.323.000</b>	<b>22.639.606.486</b>	<b>31%</b>
<b>RATA-RATA</b>		<b>647.122.405</b>	<b>848.145.188</b>	<b>1.506.534.468</b>	<b>36%</b>

*Sumber: Kecamatan Terara dalam Angka, 2017*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 Kecamatan Terara menerima dana desa sebesar Rp 10.353.958.486 dan kemudian mengalami peningkatan 31% jumlah dana desa yang diterima pada tahun 2017. Jumlah dana desa yang diterima masing – masing desa pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sama, dari 16 desa terdapat 14 desa yang mengalami kenaikan sebesar 27% dari tahun 2016. Desa Suradadi menerima dana desa sebesar 823.711.000 pada

tahun 2017 nominal tersebut mengalami peningkatan sebesar 17% dari tahun sebelumnya, sedangkan Desa Rarang mengalami peningkatan dana desa yang signifikan dari tahun 2016 hingga 2017. Pada tahun 2016 Desa Rarang menerima dana desa sebesar Rp 300.230.486 kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 181% menjadi Rp 844.283.000.

Dana desa yang diterima tiap desa di Kecamatan Terara rata – rata

mengalami peningkatan sebesar 36% pada tahun 2016 – 2017 dengan jumlah rata – rata dana desa sebesar Rp 1.506.534.468. Dengan kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Terara, namun berdasar data angka kemiskinan bahwa tidak terdapat penurunan jumlah penduduk miskin, dimana jumlah penduduk miskin dari tahun 201 hingga tahun 2017 cenderung tetap.

### Alokasi Dana Desa di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 – 2017

Alokasi dana desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi dana desa di Kecamatan Terara.

**Tabel 4 Alokasi Dana Desa Kecamatan Terara Tahun 2016 – 2017**

No	Nama Desa	Alokasi Dana Desa (Rp)		Jumlah (Rp)	%
		2016	2017		
1	Terara	512.994.805	555.909.000	1.068.903.805	8%
2	Kalianyar	535.133.597	539.088.000	1.074.221.597	1%
3	Sukadana	557.504.039	601.223.000	1.158.727.039	8%
4	Suradadi	588.876.942	547.142.000	1.136.018.942	-7%
5	Selagik	509.114.465	510.560.000	1.019.674.465	0,3%
6	Jenggik	547.367.018	555.306.000	1.102.673.018	1%
7	Rarang	504.981.585	508.136.000	1.013.117.585	1%
8	Rarang Tengah	528.633.007	580.472.000	1.109.105.007	10%
9	Rarang Batas	478.290.304	533.682.000	1.011.972.304	12%
10	Rarang Selatan	522.952.133	515.326.000	1.038.278.133	-1%
11	Embung Raja	490.693.074	570.534.000	1.061.227.074	16%
12	Embung Kandong	528.114.109	534.246.000	1.062.360.109	1%
13	Santong	574.682.259	566.975.000	1.141.657.259	-1%
14	Leming	470.167.757	453.411.000	1.013.578.757	-4%
15	Lando	533.119.000	593.448.000	1.126.567.000	11%
16	Pandan Duri	472.694.093	484.756.000	957.450.093	3%
<b>Jumlah</b>		<b>8.355.318.187</b>	<b>8.650.214.000</b>	<b>17.095.532.187</b>	<b>4%</b>
<b>Rata - Rata</b>		<b>522.207.387</b>	<b>540.638.375</b>	<b>1.068.470.762</b>	<b>4%</b>

**Sumber: Kecamatan Terara dalam Angka, 2017**

Kecamatan Terara pada tahun 2016 menerima alokasi dana desa sebesar Rp 8.355.318.187 kemudian pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 4%

menjadi Rp 8.650.214.000. Alokasi dana desa yang diterima tiap desa rata – rata sebesar Rp 522.207.387 pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 mengalami



peningkatan menjadi Rp 540.638.375. Kenaikan alokasi dana desa tertinggi yaitu sebesar 16% pada desa Embung Raja, sedangkan alokasi dana Desa Suradadi pada tahun 2017 (Rp 547.142.000) lebih kecil dari pada tahun 2016 (Rp 547.142.000).

#### **Analisis Regresi Data Panel**

Tahapan pertama yang dilakukan dalam proses regresi data panel ialah menentukan metode yang tepat, apakah akan menggunakan common effect (pooled least square), fixed effect atau random effect.

#### **Analisis Common Effect**

Model Common effect adalah model atau metode estimasi paling dasar dalam regresi data panel, dimana tetap menggunakan prinsip ordinary least square atau kuadrat terkecil. Pada model common effect ini tidak memperhatikan dimensi waktu dan juga dimensi individu atau cross section, sehingga bisa diasumsikan bahwa perilaku dari individu tidak berbeda didalam berbagai kurun waktu.

**Tabel 5 Output Common Effect Regresi Data Panel**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 10/08/18 Time: 17:01  
Sample: 2016 2017  
Periods included: 2  
Cross-sections included: 16  
Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.28228	53.18884	0.832548	0.0119
X1	-0.028075	0.033003	-0.850675	0.4019
X2	-0.432485	0.108349	3.991603	0.0004
R-squared	0.562955	Mean dependent var	253.1250	
Adjusted R-squared	0.519021	S.D. dependent var	25.45553	
S.E. of regression	21.00627	Akaike info criterion	9.016579	
Sum squared resid	12796.64	Schwarz criterion	9.153992	
Log likelihood	-141.2653	Hannan-Quinn criter.	9.062128	
F-statistic	8.261343	Durbin-Watson stat	0.484250	
Prob(F-statistic)	0.001447			

Sumber: Hasil olah dataEview

### Analisis Fixed Effect

Untuk mengestimasi data panel model Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan intersep antar desa, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya

kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar desa. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variable (LSDV).

**Tabel 6 Output Fixed Effect Regresi Data Panel**

Dependent Variable: Y  
Method: Panel Least Squares  
Date: 10/08/18 Time: 17:03  
Sample: 2016 2017  
Periods included: 2  
Cross-sections included: 16  
Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	253.1250	1.62E-11	1.56E+13	0.0000
X1	1.76E-14	5.58E-15	3.160660	0.0069
X2	-1.06E-13	3.32E-14	-3.206171	0.0063

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	1.000000	Mean dependent var	253.1250
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var	25.45553
S.E. of regression	3.10E-12	Akaike info criterion	-49.86039
Sum squared resid	1.35E-22	Schwarz criterion	-49.03591
Log likelihood	815.7662	Hannan-Quinn criter.	-49.58710
F-statistic	1.23E+26	Durbin-Watson stat	3.764706
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah dataEview

### Analisis Chow Test

Uji chow dilakukan untuk terbaik antara common effect dan fixed effect.

**Tabel 1 Output Chow Test Regresi**

Data Panel				
Redundant Fixed Effects Tests				
Equation: Untitled				
Test cross-section fixed effects				
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.	
	885378403			
	919792320			
Cross-section F	00000000	(15,14)	0.0000	
	1914.06288			
Cross-section Chi-square	4	15	0.0000	
Cross-section fixed effects test equation:				
Dependent Variable: Y				
Method: Panel Least Squares				
Date: 10/08/18 Time: 17:05				
Sample: 2016 2017				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 16				
Total panel (balanced) observations: 32				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.28228	53.18884	0.832548	0.4119
X1	-0.028075	0.033003	-0.850675	0.4019
X2	0.432485	0.108349	3.991603	0.0004
R-squared	0.362955	Mean dependent var	253.1250	
Adjusted R-squared	0.319021	S.D. dependent var	25.45553	
S.E. of regression	21.00627	Akaike info criterion	9.016579	
Sum squared resid	12796.64	Schwarz criterion	9.153992	
Log likelihood	-141.2653	Hannan-Quinn criter.	9.062128	
F-statistic	8.261343	Durbin-Watson stat	0.484250	
Prob(F-statistic)	0.001447			

Interpretasi dalam chow test dilihat pada baris Cross-section Chi-square kolom Prob, jika nilai Prob. Cross-section Chi-square  $< 0,05$  maka akan memilih fixed effect dari pada common effect. Dan sebaliknya jika nilainya  $> 0,05$  maka akan dipilih common effect daripada fixed

effect. Output chow test pada penelitian ini menunjukkan angka 0,0000 nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model fixed effect lebih tepat digunakan daripada model common effect.

### Analisis Random Effect

Hasil chow test menunjukkan bahwa metode yang digunakan merupakan fixed effect, maka langkah selanjutnya ialah

melakukan random effect untuk memilih fixed effect atau random effect yang akan digunakan.

**Tabel. 2 Output Random Effect Regresi Data Panel**

Dependent Variable: Y				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 10/08/18 Time: 17:29				
Sample: 2016 2017				
Periods included: 2				
Cross-sections included: 16				
Total panel (balanced) observations: 32				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	253.1475	5.064107	49.98858	0.0000
X1	-1.35E-27	5.58E-15	-2.42E-13	1.0000
X2	2.23E-26	3.32E-14	6.74E-13	1.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			20.24670	1.0000
Idiosyncratic random			3.10E-12	0.0000
Weighted Statistics				
R-squared	0.000000	Mean dependent var	2.74E-11	
Adjusted R-squared	-0.068966	S.D. dependent var	2.75E-12	
S.E. of regression	2.85E-12	Sum squared resid	2.36E-22	
F-statistic	0.000000	Durbin-Watson stat	0.000000	
Prob(F-statistic)	1.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.000001	Mean dependent var	253.1250	
Sum squared resid	20087.52	Durbin-Watson stat	0.000000	

Sumber: Hasil olah data Eview

### Analisis Hausman Test

Uji Hausman atau Hausman Test merupakan uji yang digunakan untuk menentukan metode yang terbaik antara

fixed effect dan random effect. Jika Hausman Test menerima H1 atau p value < 0,05 maka metode yang kita pilih adalah fixed effect. Jika Hausman Test menerima

H0 atau p value > 0,05 maka metode yang kita pilih adalah random effect.

**Tabel 3 Output Hausman Test Regresi Data Panel**

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	2	1.0000

\* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	0.000000	-0.000000	0.000000	0.0000
X2	-0.000000	0.000000	0.000000	0.0000

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Date: 10/08/18 Time: 17:31

Sample: 2016 2017

Periods included: 2

Cross-sections included: 16

Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	253.1250	1.62E-11	1.56E+13	0.0000
X1	1.76E-14	5.58E-15	3.160660	0.0069
X2	-1.06E-13	3.32E-14	-3.206171	0.0063

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	1.000000	Mean dependent var	253.1250
Adjusted R-squared	1.000000	S.D. dependent var	25.45553
S.E. of regression	3.10E-12	Akaike info criterion	-49.86039
Sum squared resid	1.35E-22	Schwarz criterion	-49.03591
Log likelihood	815.7662	Hannan-Quinn criter.	-49.58710
F-statistic	1.23E+26	Durbin-Watson stat	3.764706
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil olah dataEview

Interpretasi dalam hausman test dilihat pada baris cross-section random kolom Prob, jika nilai Prob. Cross-section Chi-square < 0,05 maka akan memilih fixed effect dari pada common effect. Dan sebaliknya jika nilainya > 0,05 maka akan dipilih random effect daripada fixed effect. Output hausman test pada penelitian ini menunjukkan angka 1,0000 nilai tersebut lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa model random effect lebih tepat digunakan daripada model fixed effect.

#### **Analisis Lagrange Multiplier (LM) Test**

Uji Lagrange Multiplier dengan evIEWS dilakukan jika berada pada dua kondisi saat melakukan regresi data panel. yaitu:

Chow Test menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah Common Effect dari pada fixed effect. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah Common Effect lebih baik dari pada Random Effect, maka diperlukan Lagrange Multiplier Test.

Uji Hausman menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah Random effect dari pada Fixed Effect. Sehingga

langkah berikutnya untuk menentukan apakah Random Effect lebih baik dari pada Common Effect, maka diperlukan Lagrange Multiplier Test.

Uji lagrange multiplier menggunakan data residual yang dihasilkan dari analisis menggunakan evIEWS, kemudian data residual dihitung menggunakan program Ms. Excel dengan menghitung nilai LMhitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$LM_{hitung} = \frac{nT}{2(T-1)} \left[ \frac{T^2 \sum e^{-2}}{\sum e^2} - 1 \right]^2$$

Keterangan:

n = jumlah desa

T = jumlah periode

$\sum e^{-2}$  = jumlah rata – rata residual kuadrat

$\sum e^2$  = jumlah residual kuadrat

Nilai LMhitung akan dibandingkan dengan nilai Chi Squared Table dengan derajat kebebasan (degree of freedom) sebanyak jumlah variabel independen (bebas atau X) dan alpha atau tingkat signifikansi sebesar 5% (0.05) yang ditentukan dari awal penelitian.

Pengambilan

kesimpulannya sebagai berikut:

Jika LMhitung > Chi Squared Table, maka model yang terbaik adalah random effect, Jika LMhitung < Chi Squared Table, maka model yang

terbaik adalah common effect. Setelah dilakukan uji untuk masing – masing model dan didapatkan hasil bahwa dalam uji lagrange multiplier model yang terbaik merupakan model common effect, dalam

hausman test menghasilkan bahwa random effect merupakan model terbaik dan dalam uji chow test menghasilkan model terbaik model fixed effect

**Tabel 4 Tabel Residual**

<b>obs</b>	<b>Residual</b>
Terara - 16	27.91093
Terara - 17	14.5531
Kalianyar - 16	-42.6267
Kalianyar - 17	-39.3945
Sukadana - 16	15.04034
Sukadana - 17	1.706108
Suradadi - 16	-4.19262
Suradadi - 17	17.21257
Selagik - 16	-21.1727
Selagik - 17	-16.8013
Jenggik - 16	8.179299
Jenggik - 17	9.983796
Rarang - 16	15.74967
Rarang - 17	29.65964
Rarang Tengah - 16	21.27418
Rarang Tengah - 17	4.090584
Rarang Batas - 16	-13.0975
Rarang Batas - 17	-32.126
Rarang Selatan - 16	7.583568
Rarang Selatan - 17	15.80848
Embung Raja - 16	11.90336
Embung Raja - 17	-17.6007
Embung Kandong - 16	-34.79
Embung Kandong - 17	-32.5533
Santong - 16	1.285628
Santong - 17	9.835272
Leming - 16	-4.28643
Leming - 17	7.968647
Lando - 16	29.9976
Lando - 17	9.321073
Pandan Duri - 16	-0.13904
Pandan Duri - 17	-0.28296

$$LM_{hitung} = \frac{16(2)}{2(2-1)} \left[ \frac{2^2(5575,31)}{12796,64} - 1 \right]^2$$

$$= 8,826$$

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti berhak menentukan model terbaik yang digunakan, dimana peneliti memilih model common effect dikarenakan model common effect merupakan pendekatan data panel yang tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya mengkombinasikan data series waktu dan cross section, dimana pada penelitian ini data jumlah penduduk miskin pada tahun 2016 dan tahun 2017 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan atau sama sehingga dapat diasumsikan bahwa perilaku dari individu tidak berbeda didalam beberapa kurun waktu.

### Interpretasi Model

Tahapan yang dilakukan setelah pemilihan model yang tepat maka dilakukan interpretasi model *common effect* yang telah dihasilkan, dengan rincian sebagai berikut:

Terdapat tiga uji statistik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, tiga uji tersebut adalah:

1. Uji Signifikansi serentak (*F-test*)

Uji F merupakan uji simultan dari regresi data panel, dimana nilai F menunjukkan tingkat singnifikansi pengaruh seluruh variabel independen (dana desa dan alokasi dana desa) terhadap variabel dependen (angka kemiskinan di Kecamatan Terara). Nilai F didapatkan dengan membandingkan F hitung dan F tabel, dengan menggunakan *E-views* dapat dilihat pada nilai Prob (F Statistics). Jika nilai  $\text{Prob} > \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima, dan sebaliknya jika nilai  $\text{Prob} < \alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak.

$H_0$  : variabel dana desa dan alokasi dana desa tidak mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Terara

$H_1$  : variabel dana desa dan alokasi dana desa mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Terara

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan analisis yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan dari penelitian ini, ialah:

1. Hasil dari uji secara simultan (uji F) diketahui bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel



dependen, kemudian pada hasil uji t diketahui bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Kecamatan Terara, sedangkan variabel dana desa tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kecamatan Terara.

2. Diketahui alokasi dana desa memiliki koefisien negatif, yang mana memiliki arti setiap penambahan alokasi dana desa akan menurunkan angka kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan alokasi dana desa dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik maka akan mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.
3. Alokasi dana desa berpengaruh signifikan dalam penurunan angka kemiskinan, hal ini sudah sesuai dengan salah satu tujuan alokasi dana

desa ialah pengentasan kemiskinan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007)

#### **Saran**

1. Perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa lebih diefisiensikan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan - pelatihan keterampilan untuk peningkatan penghasilan dengan memanfaatkan potensi yang ada di tiap desa di Kecamatan Terara
2. Peruntukkan alokasi dana desa lebih diarahkan untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya bergulir dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dengan modal kerja yang bergulir diharapkan jumlah modal kerja akan terus meningkat setiap tahunnya

**Tabel 5 Hasil Perhitungan Model *Common Effect***

---

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 10/08/18 Time: 17:01  
 Sample: 2016 2017  
 Periods included: 2  
 Cross-sections included: 16  
 Total panel (balanced) observations: 32

---

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	44.28228	53.18884	0.832548	0.0119
X1	-0.028075	0.033003	-0.850675	0.4019
X2	-0.432485	0.108349	3.991603	0.0004
R-squared	0.562955	Mean dependent var	253.1250	
Adjusted R-squared	0.519021	S.D. dependent var	25.45553	
S.E. of regression	21.00627	Akaike info criterion	9.016579	
Sum squared resid	12796.64	Schwarz criterion	9.153992	
Log likelihood	-141.2653	Hannan-Quinn criter.	9.062128	
F-statistic	8.261343	Durbin-Watson stat	0.484250	
Prob(F-statistic)	0.001447			

Sumber: Hasil olah dataEview

Dari hasil analisis yang disajikan pada tabel 4.11 diketahui bahwa nilai Prob (F statistics) sebesar  $0,001447 < \text{probabilitas } \alpha (0,05)$ , yang bahwa terima terima  $H_1$  tolak  $H_0$ . Kondisi ini menunjukkan bahwa secara bersama – sama atau simultan variabel independen yaitu dana desa dan alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa di Kecamatan Terara.

#### Uji Signifikansi parsial (T-test)

Uji T merupakan uji yang digunakan untuk melihat secara parsial atau individu

apakah masing –masing variabel independen yang terdiri dari dana desa dan alokasi dana desa secara signifikan berpengaruh pada variabel independen. Jika nilai Prob  $> \alpha (0,05)$  maka  $H_0$  diterima, dan sebaliknya jika nilai Prob  $< \alpha (0,05)$  maka  $H_0$  ditolak.

$H_0$  : variabel independen tidak mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Terara

$H_1$  : variabel independen mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Terara

**Tabel 6 Hasil Uji t pada Model *Common Effect***

Variabel	Koefisien	Probabilitas	Keterangan
Dana Desa ( $X_1$ )	-0,028075	0,4019	Tidak Berpengaruh
Alokasi Dana Desa ( $X_2$ )	-0,432485	0,0004	Berpengaruh

1. Variabel Dana Desa ( $X_1$ )

Variabel dana desa memiliki t hitung sebesar  $0,4019 >$  nilai probabilitas  $\alpha$  (0,05), maka terima  $H_0$  sehingga variabel dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa di Kecamatan Terara.

2. Variabel Alokasi Dana Desa ( $X_2$ )

Variabel alokasi dana desa memiliki t hitung sebesar  $0,0004 <$  nilai probabilitas  $\alpha$  (0,05), maka tolak  $H_0$  sehingga variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa di Kecamatan Terara.

Koefisien Determinasi ( $R^2$  atau  $R^2$  Adjusted)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi dari nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel – variabel independennya. Koefisien determinasi juga menunjukkan kesesuaian garis regresi terhadap data. Dalam regresi data panel yang digunakan ialah  $R^2$  Adjusted. Pada tabel 4.11 diketahui nilai  $R^2$  Adjusted sebesar 0,519 atau 52% variasi dari variabel kemiskinan desa di Kecamatan Terara mampu dijelaskan oleh variabel dana desa dan alokasi dana desa

dan sisanya 48% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang dijadikan model.

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan perhitungan dengan menggunakan uji statistik maka didapat persamaan regresi ialah sebagai berikut:

$$Y = 44.28228 - 0.028075X_1 - 0,432485X_2$$

Keterangan:

Y = angka kemiskinan desa di Kecamatan Terara

$X_1$  = dana desa

$X_2$  = alokasi dana desa

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu konstanta sebesar 44.28228 yang menyatakan bahwa jika nilai dari dana desa dan alokasi dana desa adalah konstan (0) maka nilai angka kemiskinan di Kecamatan Terara sebesar 44.28228. Nilai koefisien dana desa memiliki koefisien -0.028075 dan alokasi dana desa memiliki koefisien - 0,432485, yang mana memiliki arti setiap perubahan 1 unit (Rp 1.000.000) dana desa maka angka kemiskinan di Kecamatan Terara akan mengalami penurunan sebesar - 0.028075, sedangkan setiap perubahan alokasi dana desa sebesar 1 unit (Rp. 1.000.000) akan menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,432485.

**Uji Dua Mean Rata – Rata**

Untuk menganalisa data ada tidaknya perbedaan kemiskinan di Kecamatan Terara antara tahun 2016 dan 2017 menggunakan uji beda dua mean rata-rata. Namun berdasarkan data yang diperoleh angka kemiskinan di Kecamatan Terara pada tahun 2016 dan tahun 2017 adalah sama, maka uji dua mean rata – rata tidak dapat dilakukan.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil perhitungan analisis yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan dari penelitian ini, ialah:

1. Hasil dari uji secara simultan (uji F) diketahui bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, kemudian pada hasil uji t diketahui bahwa variabel alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan di Kecamatan Terara, sedangkan variabel dana desa tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Kecamatan Terara.
2. Diketahui alokasi dana desa memiliki koefisien negatif, yang mana memiliki arti setiap penambahan alokasi dana desa akan menurunkan angka kemiskinan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penambahan alokasi dana desa dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik maka akan

mengurangi angka kemiskinan di Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

3. Alokasi dana desa berpengaruh signifikan dalam penurunan angka kemiskinan, hal ini sudah sesuai dengan salah satu tujuan alokasi dana desa ialah pengentasan kemiskinan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007)

#### **Saran**

1. Perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa lebih diefisiensikan untuk pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan - pelatihan keterampilan untuk peningkatan penghasilan dengan memanfaatkan potensi yang ada di tiap desa di Kecamatan Terara
2. Peruntukkan alokasi dana desa lebih diarahkan untuk pembiayaan modal kerja yang sifatnya bergulir dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dengan modal kerja yang bergulir diharapkan jumlah modal kerja akan terus meningkat setiap tahunnya.

---

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Abidin, Muhammad Zainul. 2015. "Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa". Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik. Vol. 6 No. 1, hlm 61-76.
- Adisasmita, Rahardjo. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aldy, Riko. 2012. Tinjauan yuridis efektifitas alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan desa di desa aliantan kecamatan kabun kabupaten rokan hulu tahun 2011. Dikutip dari <http://repository.unri.ac.id/bitstream/123456789/2556/1/riko>, tanggal 24 juni 2017.
- Arsyad, L. 2004. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.
- Astuti, P. B. 2012. Efektivitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Desa dan Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2011. Jurnal Admisnistrasi Publik, 19.
- Azwardi, & Suntoko. 2014. Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 29-41. Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa.....(Intan Mala Sari)
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2015.
- Badan Pusat Statistik. 2007. "Kemiskinan". <http://www.bps.go.id>
- \_\_\_\_\_. 2014. Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2013.
- Beratha, I Nyoman. 1982. Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. 2015.
- Dura, J. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. JIBEKA, 26-32.
- Fuad, Noor, dkk. . 2014. Dasar-dasar Keuangan Publik. Jakarta: LPKAP-Badan Pendidikan dan Peatihan Keuangan.
- Gujrati, Damodar N. & Dawn C. Porter. 2011. Dasar - dasar Ekonometrika : Edisi 5-Buku 1 Jakarta: Salemba Empat.
- \_\_\_\_\_. 2012. Dasar - dasar Ekonometrika : Edisi 5-Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Irawan, & Suparmoko. 2006. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE.

Haughton, Jonathan & Shahidur R. Khander. 2010. Pedoman tentang Kemiskinan dan Ketimpangan. Jakarta: Salemba Empat

Hargono, DS. 2010. Efektifitas penyaluran alokasi dana desa pada empat desa di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali, dalam <http://lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=20236862&lokasi=lokal>, Diakses tanggal 26 juni 2017.

Hernowo, Basah. 2010 Kajian pembangunan ekonomi desa untuk mengatasi kemiskinan. Dalam [www. bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id), diakses tanggal 3 April 2017.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Kementerian Dalam Negeri. Buku induk kode data wilayah 2013: Permendagri Nomor 18/2013. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri. 2013.

Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah. Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Kuncoro, M. 1997. Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah, dan Kebijakan. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

\_\_\_\_\_. 2013. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi Edisi 4. Jakarta: Erlangga.

Mahfud. 2009 .“Analisis dampak alokasi dana desa (add) terhadap pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa”. Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 5, Nomor 1, Maret 2009.

Mustikawati. 2016. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Rapak Lambur Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 4 No. 2, hlm 2739-2752.

Nanga, M. 2006. “Dampak transfer fiskal terhadap kemiskinan di Indonesia: suatu analisis simulasi kebijakan”. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Nuraini, I. 2013. Pengantar Ekonomi Mikro. Malang: UMM Press.

Nurman. 2015. Strategi Pembangunan Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa.....(Intan Mala Sari)

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Prasetyanto PP , Eko. 2012. Dampak alokasi dana desa pada era desentralisasi fiskal terhadap perekonomian daerah di indonesia. Disertasi. IPB, Bogor.

Prasetyo, Yudhi & Gregorius Nasiansenus Masdjojo. 2014. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di 10 Desa Wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 6, hlm 302-319.

Putra, Chandra Kusuma, dkk. 2013. Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 1 No. 6, hlm 1203-1212.

Sajogyo. 1997. Kemiskinan dan kebutuhan Minum Pangan. Bogor: Lembaga Penelitian Sosiologi Pedesaan.

Sari, Risya Novita, dkk. 2012. Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Kantor Pemerintah Desa Ngasem, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri). *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. 3 No. 11, hlm 1880-1885.

Sugiyono, 2002. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta. Pustaka Baru Press Yogyakarta

Suksesi. 2007. Efektifitas program alokasi dana desa (add) terhadap perekonomian desa di Kabupaten Pacitan. Dikutip dalam <http://journalfe.unitomo.ac.id/wpcontent/uploads/2012/04/efektifitasprogram-alokasi-dana-desA.pdf>. diakses tanggal 20 Juli 2017.

Thomas. 2013. Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa sebangung kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1):51-64. diakses tanggal 25 Juni 2017.

Todaro, M. P. 2000. Pembangunan Ekonomi 1. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Usman. 2006. Dampak desentralisasi fiskal terhadap distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan. Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa. Jakarta: Rajawali Pers